

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Situasi riil kehidupan penyandang disabilitas di tengah masyarakat masih ditandai oleh kompleksitas persoalan yang bersifat multidimensional, terutama dalam aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam bidang kesehatan, penyandang disabilitas menunjukkan kondisi yang beragam dengan tingkat keterbatasan yang berbeda-beda. Keragaman kondisi tersebut menuntut adanya perawatan khusus, perhatian intensif, serta dukungan medis berkelanjutan. Dalam konteks keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah, situasi ini menjadi beban yang berat dan sering kali melampaui kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas secara optimal.

Namun demikian, persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak berhenti pada aspek kesehatan dan ekonomi semata. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, mereka masih kerap mengalami marginalisasi, stigmatisasi, diskriminasi, serta pembatasan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk-bentuk penolakan tersebut dapat muncul secara terbuka maupun terselubung melalui sikap, kebijakan, dan praktik sosial yang tidak inklusif. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan disabilitas bukan semata-mata persoalan individual, melainkan persoalan struktural yang berakar pada cara pandang masyarakat terhadap disabilitas itu sendiri.

Secara kultural, disabilitas masih sering dipahami bukan sebagai bagian dari keberagaman manusia, melainkan sebagai kekurangan individual yang harus disesuaikan dengan standar sosial yang dominan. Cara pandang ini memperkuat paradigma yang memposisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang dianggap tidak normal, tidak mandiri, dan tidak produktif. Bahkan dalam beberapa konteks budaya dan religius, disabilitas masih dikaitkan dengan konsekuensi moral seperti dosa, kutukan, atau hukuman akibat kesalahan orang tua maupun leluhur. Stigma semacam ini tidak hanya melukai martabat penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat praktik pengucilan sosial dan membatasi ruang partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks inilah para suster ALMA hadir sebagai respons konkret Gereja terhadap tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas. Sebagai komunitas iman, karya pelayanan yang dijalankan oleh para suster ALMA merupakan perwujudan panggilan rohani untuk meneladani kehidupan Yesus, yang secara khusus berpihak kepada kaum miskin, dan mereka yang terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, karya pelayanan ALMA terhadap penyandang disabilitas di panti asuhan Santo Aloysius Wairklau mencakup enam hal.

Pertama, melihat wajah Allah dalam diri penyandang disabilitas merupakan dasar spiritualitas pelayanan para suster ALMA. Mereka meyakini bahwa setiap bentuk pelayanan kepada penyandang disabilitas adalah bentuk perjumpaan dengan Kristus sendiri yang hadir dalam diri sesama, khususnya mereka yang menderita, tersisih, dan mengalami disabilitas. Oleh karena itu, pendampingan terhadap penyandang disabilitas menegaskan bahwa Allah hadir secara konkret dalam pengalaman penderitaan manusia.

Kedua, mengangkat martabat penyandang disabilitas menjadi salah satu inti pelayanan para suster ALMA yang diwujudkan melalui pendampingan personal, berkelanjutan dan penuh kasih. Dalam pelayanan tersebut, para suster ALMA menghadirkan pendampingan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, spiritual, mental dan medis sebagai bagian dari proses rehabilitasi yang memulihkan dan memberdayakan. Dengan pendekatan ini, penyandang disabilitas diteguhkan sebagai subjek yang bermartabat, disadarkan akan nilai dirinya sebagai citra Allah.

Ketiga, mewujudkan inklusivitas bagi penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam kehidupan komunitas panti asuhan ALMA. Panti tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, melainkan juga sebagai ruang hidup bersama yang memberikan kesempatan bagi setiap individu terlibat secara setara dalam dinamika komunitas tanpa mengalami marginalisasi dan diskriminasi. Sikap penerimaan, pendampingan, dan pemberdayaan menjadi wujud nyata dari keberpihakan terhadap penyandang disabilitas dalam membangun komunitas yang inklusif.

. Keempat, mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari komitmen pelayanan para suster ALMA dalam memperjuangkan martabat manusia. Aksesibilitas dipahami tidak hanya sebagai penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga sebagai upaya membuka ruang

partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Para suster ALMA menghadirkan pelayanan yang mencakup rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi karya, serta pembinaan mental dan spiritual disertai pelayanan medis. Dengan demikian, pelayanan tersebut diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas sekaligus pemulihan martabat mereka sebagai pribadi yang utuh.

Kelima, spiritualitas ALMA menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek belas kasihan, melainkan subjek yang memiliki martabat pribadi yang harus dihormati, didengar, dan dilibatkan secara aktif dalam kehidupan bersama. Pandangan ini menjadi dasar etis dan teologis dalam pelayanan para suster ALMA yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai pribadi yang bernilai dan memiliki potensi untuk berkembang. Dalam praktik pelayanannya, para suster mendampingi penyandang disabilitas melalui proses rehabilitasi yang berorientasi pada pemberdayaan dan pengembangan kemampuan yang mereka miliki.

Keenam, pelayanan ALMA merupakan wujud solidaritas nyata terhadap kelompok yang terpinggirkan, khususnya penyandang disabilitas. Solidaritas ini tidak hanya berupa rasa belas kasihan, tetapi diwujudkan melalui keterlibatan nyata para suster ALMA dalam hidup bersama, mendengarkan, serta mendampingi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari dalam proses rehabilitasi. Dengan demikian, pelayanan ALMA menghadirkan kasih Allah secara konkret melalui relasi persaudaraan, empati, dan pendampingan yang menyeluruh dalam aspek fisik, psikologis, sosial dan spiritual.

Keseluruhan karya pelayanan ALMA terhadap penyandang disabilitas di atas, dapat ditinjau berdasarkan perspektif teologi disabilitas Nancy L. Eiesland. Dalam pandangan Eiesland, Allah hadir dalam realitas penderitaan manusia melalui peristiwa inkarnasi. Bagi Eiesland, inkarnasi bukan sekadar doktrin kristologis yang bersifat abstrak, melainkan peristiwa teologis yang menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh masuk ke dalam sejarah, kerapuhan dan keterbatasan manusiawi. Dalam diri Yesus, Allah tidak berdiri jauh dari kerapuhan manusia, tetapi mengambil bagian sepenuhnya di dalamnya. Dengan demikian, penderitaan, keterbatasan, dan bahkan pengalaman disabilitas tidak berada di luar karya keselamatan Allah, melainkan menjadi *locus* perjumpaan antara Allah dan manusia.

Refleksi ini mencapai puncaknya dalam pemahaman Eiesland tentang Kristus yang bangkit dengan tubuh yang terluka. Kebangkitan tidak menghapus luka-luka penyaliban, tetapi justru

mempertahankannya sebagai identitas Kristus yang dimuliakan. Tubuh yang terluka itu menjadi simbol solidaritas Allah terhadap mereka yang menderita, tersingkir, termasuk penyandang disabilitas. Dalam artian bahwa, tubuh disabilitas tidak dapat direduksi sebagai kekurangan biologis atau penyimpangan dari norma, penyebab dosa, melainkan harus dipahami sebagai bagian integral dari keberagaman manusia. Eiesland bahkan melalui refleksinya menyatakan “Allah penyandang disabilitas” untuk menegaskan bahwa dalam Kristus yang bangkit, Allah mengidentifikasikan diri-Nya dengan tubuh yang terluka.

Lebih lanjut, Eiesland menegaskan bahwa dasar martabat manusia terletak pada kenyataan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Pandangan teologis ini menekankan pentingnya inklusivitas sebagai konsekuensi etis dalam membangun relasi yang setara, partisipatif, dan bermartabat dalam kehidupan sosial dan gerejawi. Inklusivitas menuntut transformasi struktural, pola pikir, sehingga penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek yang memiliki martabat sama seperti manusia lainnya.

Dimensi konkret dari inklusivitas terwujud dalam aksesibilitas. Dalam perspektif Eiesland, aksesibilitas merupakan bentuk pengakuan nyata atas martabat penyandang disabilitas. Melalui aksesibilitas, penyandang disabilitas diakui sebagai subjek penuh dalam kehidupan bersama. Mereka tidak lagi ditempatkan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai pribadi yang memiliki potensi dalam diri mereka masing-masing.

Dengan demikian, teologi disabilitas Eiesland menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah pribadi yang diciptakan Allah dengan martabat yang sama dan utuh seperti manusia lainnya. Martabat tersebut berakar pada *imago Dei*, diteguhkan dalam inkarnasi, dan dinyatakan dalam kebangkitan Kristus yang tetap memperlihatkan luka-Nya. Karena itu, kehidupan sosial dan Gereja harus dibangun atas dasar prinsip pengakuan, inklusivitas, dan aksesibilitas, sehingga penyandang disabilitas sungguh diakui sebagai subjek penuh yang bermartabat dan mampu berkontribusi secara aktif dalam kehidupan komunitas. Dalam konteks ini, disabilitas menjadi *locus* kehadiran Allah, di mana solidaritas ilahi dinyatakan dan martabat manusia dipulihkan.

Jika ditinjau dari pemikiran tersebut, peran para suster ALMA dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan karya pastoral Gereja, khususnya dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Karya pastoral merujuk pada seluruh bentuk kerasulan Gereja sebagai perwujudan konkret partisipasi dalam perutusan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Oleh karena

itu, setiap aktivitas pastoral harus berakar pada pribadi dan karya Kristus sebagai dasar sekaligus orientasi utama. Landasan keputusan ini ditegaskan dalam Injil Matius 25:35-36, yang menekankan Kristus hadir dalam diri mereka yang lapar, haus, orang asing, yang telanjang, sakit, dan yang dipenjarakan. Sementara itu, dalam Injil Lukas 4:18-19 menggambarkan misi Yesus untukewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin, membebaskan para tawanan, memulihkan penglihatan orang buta, dan membebaskan mereka yang tertindas.

Berdasarkan praktik pelayanan para suster ALMA di Panti Asuhan Santo Aloysius Waiklau, dapat dirumuskan beberapa model pastoral yang relevan untuk diimplementasikan dalam kehidupan menggereja. Pertama, model pelayanan pastoral berbasis pemberdayaan. Model ini berorientasi pada penguatan kapasitas individu penyandang disabilitas melalui pengembangan keterampilan yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai proses peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran kritis dan keberanian untuk memperjuangkan hak-hak secara bermartabat.

Kedua, model pelayanan berbasis inklusivitas. Model ini menekankan pentingnya transformasi struktur dan budaya gerejawi agar mampu menjamin partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan Gereja. Inklusivitas tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan diwujudkan dalam kebijakan, praktik pastoral, serta pola relasi yang mengakui kesetaraan martabat setiap anggota komunitas.

Ketiga, penguatan aspek penyadaran umat. Model ini diarahkan pada proses edukatif yang sistematis guna membentuk pemahaman teologis dan sosial yang komprehensif mengenai disabilitas dan menumbuhkan sikap yang lebih terbuka dalam menerima kehadiran penyandang disabilitas. Langkah ini juga merupakan strategi dalam mengurangi berbagai bentuk diskriminasi yang masih dialami oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, keberpihakan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan pada individu disabilitas, tetapi juga perlu memperhatikan lingkungan sosial tempat mereka menjalani kehidupan. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan keberlanjutan hidup penyandang disabilitas. Konstruksi sosial yang keliru mengenai disabilitas seringkali membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang kurang tepat terhadap mereka. Oleh sebab itu, proses edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian ini, dirumuskan enam rekomendasi yang ditujukan kepada enam pihak terkait.

5.2.1 Bagi Gereja

Gereja memiliki panggilan moral dan teologis untuk berpihak kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi dalam masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Keberpihakan tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan komunitas Gereja yang inklusif, yaitu komunitas yang menghargai martabat penyandang disabilitas, menerima kehadiran mereka secara utuh, dan menjamin partisipasi dan keterlibatan mereka secara aktif dalam kehidupan Gereja.

Untuk merealisasikan komunitas yang inklusif tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh. Pertama, penyandang disabilitas perlu dipandang sebagai subjek dalam pelayanan pastoral, bukan sekadar sebagai objek belas kasihan. Perspektif ini menegaskan pengakuan terhadap kapasitas, potensi, dan kontribusi mereka dalam kehidupan Gereja.

Kedua, Gereja perlu menerapkan prinsip *universal design* dalam pembangunan maupun renovasi gedung gereja dan fasilitas pendukung lainnya agar seluruh sarana tersebut dapat diakses secara setara oleh penyandang disabilitas.

Ketiga, diperlukan upaya edukatif umat untuk membangun kesadaran dan penerimaan terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, para pelayanan pastoral perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai isu-isu disabilitas agar mampu memberikan pendampingan sekaligus pendidikan yang tepat kepada umat.

Keempat, Gereja perlu mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas dengan mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan serta memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan bermartabat.

Kelima, Gereja perlu merumuskan dan mengimplementasikan strategi katekese yang inklusif dan berkelanjutan guna membentuk kesadaran iman umat, sehingga mampu menerima, mengakui, dan menghargai martabat penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari kehidupan Gereja dan masyarakat.

Selain itu, pelayanan pastoral kepada penyandang disabilitas juga menuntut adanya kolaborasi lintas sektor. Gereja diharapkan menjalin kerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini penting agar pelayanan pastoral yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan konkret penyandang disabilitas secara komprehensif dan berkelanjutan.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Pemerintah memegang peran sentral dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyandang disabilitas memiliki kedudukan hak yang setara dengan warga negara lainnya. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental mereka, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Di samping itu, pemerintah juga harus menjamin tersedianya aksesibilitas terhadap infrastruktur publik dan fisik yang memungkinkan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penguatan sosialisasi serta implementasi regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan perlu direalisasikan secara konsisten melalui pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penyandang disabilitas tidak lagi berada di pinggiran, melainkan diakui sebagai subjek yang turut berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

5.2.3 Bagi Para Suster ALMA di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere

Pelayanan para suster ALMA di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau telah menunjukkan komitmen nyata dalam mendampingi penyandang disabilitas. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang kerap muncul ialah minimnya keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi di panti.

Dalam konteks ini, para suster ALMA diharapkan terus mengupayakan pendekatan kepada keluarga penyandang disabilitas agar mereka terlibat secara aktif dalam mendukung proses pemulihan dan pemberdayaan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan yang berkelanjutan, komunikasi intensif, dan sosialisasi

yang membangun kesadaran akan pentingnya dukungan keluarga. Dengan demikian, para penyandang disabilitas yang menjalani rehabilitasi tidak merasa terisolasi, melainkan tetap merasakan kehadiran dan dukungan emosional dari keluarga mereka.

5.2.4 Bagi Para Peneliti Isu Disabilitas

Isu disabilitas telah menjadi perhatian berbagai disiplin ilmu karena kompleksitas persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Berbagai penelitian telah dilakukan, namun masih terbuka ruang kajian yang lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan peran Gereja sebagai institusi religius.

Salah satu fokus penelitian yang relevan untuk dikembangkan adalah bagaimana Gereja menjalankan tugas profetisnya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pelayanan sakramental. Pertanyaan mendasar yang perlu dielaborasi lebih lanjut ialah bagaimana Gereja dapat menjadi suara yang menyuarakan kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas secara konkret dan berkeadilan dalam kehidupan pastoral maupun sosial.

5.2.5 Bagi Para Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau-Maumere

Pelaksanaan rehabilitasi di Panti Asuhan St. Aloysius Wairklau diarahkan pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis penyandang disabilitas, sekaligus pembekalan keterampilan sebagai sarana pemberdayaan. Dalam proses ini, penyandang disabilitas tidak ditempatkan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan tersebut menjadi modal penting bagi mereka untuk membangun kembali kepercayaan diri serta mempersiapkan diri berintegrasi kembali dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

5.2.6 Bagi Orang Tua dan Keluarga dari Penyandang Disabilitas

Orang tua dan keluarga memegang peranan fundamental dalam melindungi, memenuhi, dan menjamin hak-hak dasar penyandang disabilitas. Bentuk dukungan yang paling mendasar adalah penerimaan terhadap kehadiran anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Sikap penerimaan dan perhatian yang konsisten dari keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, keterlibatan aktif keluarga dalam

proses rehabilitasi menjadi faktor pendukung yang esensial bagi keberhasilan pendampingan dan pemulihan penyandang disabilitas.